

Manajemen Peningkatan Mutu Kurikulum Melalui K13 Dan Kurikulum Merdeka

Anisya Umi Khoiroh, Siti Toyyibatin Nisak, Intan Nur Aini, Juhairiyah, Ali Nurhadi

Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Indonesia

Email: anisaumikhoiroh10@gmail.com

Abstract

This article aims to examine in depth the management in improving the quality of the curriculum through the approach of the 2013 Curriculum (K13) and the Independent Curriculum. The method used in this study is a literature review (library research) by examining various academic sources, such as journals, books, and relevant education policy documents. The analysis focuses on how curriculum management is applied in the two curricula to answer the challenges of education quality in the global era. K13 offers a scientific learning approach and the strengthening of authentic assessments, while the Merdeka Curriculum gives freedom to educational units in designing contextual and student-centred learning. The results of the study show that the effectiveness of improving curriculum quality is highly dependent on strategic planning, adaptive implementation, and continuous evaluation in the curriculum management framework. Thus, strengthening managerial capacity at the level of educational institutions is a key factor in realizing a transformation of a quality curriculum that is relevant to the needs of the times.

Keywords: *Quality Management, K13, Independent Curriculum, Literature Review*

A. Pendahuluan

Kurikulum merupakan elemen fundamental dalam sistem pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran serta pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kualitas kurikulum sangat menentukan mutu hasil belajar peserta didik, sehingga pengelolaannya memerlukan perhatian serius, khususnya dalam konteks dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Di Indonesia, reformasi kurikulum telah mengalami berbagai tahap perkembangan, di antaranya melalui implementasi Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan berorientasi pada penguatan kompetensi abad 21.

Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan saintifik, penilaian autentik, serta penguatan karakter melalui integrasi nilai-nilai dalam setiap mata pelajaran. Sementara itu, Kurikulum Merdeka menghadirkan paradigma baru dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu memberi kebebasan bagi satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal, kebutuhan peserta didik, serta perkembangan zaman. Perubahan ini menuntut adanya manajemen kurikulum yang efektif, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, dalam praktiknya, peningkatan mutu kurikulum tidak dapat dilepaskan dari kemampuan manajerial lembaga pendidikan dalam mengelola perubahan, menyusun strategi pelaksanaan, serta mengevaluasi hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen peningkatan mutu kurikulum melalui K13 dan Kurikulum Merdeka menjadi penting untuk dilakukan sebagai dasar dalam merumuskan langkah strategis bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Artikel ini disusun berdasarkan kajian literatur yang bertujuan untuk menggali berbagai pandangan teoritis dan temuan empiris terkait implementasi K13 dan Kurikulum Merdeka, khususnya dalam konteks manajemen kurikulum. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi manajemen kurikulum yang efektif dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik yang dikaji. Kajian literatur dipilih karena artikel ini bertujuan untuk menyusun sintesis teoritis dan konseptual mengenai manajemen peningkatan mutu kurikulum melalui implementasi Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur sekunder, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, kebijakan resmi Kementerian Pendidikan, serta dokumen-dokumen peraturan yang berkaitan dengan kurikulum di Indonesia. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dan kontribusinya terhadap pembahasan manajemen kurikulum, mutu pendidikan, serta karakteristik K13 dan Kurikulum Merdeka.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, serta hubungan antar konsep yang muncul dari berbagai sumber. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) identifikasi topik utama dalam setiap literatur; (2) klasifikasi berdasarkan fokus bahasan (misalnya: perencanaan kurikulum, implementasi, evaluasi, tantangan, dan strategi manajemen); dan (3) penyusunan sintesis hasil kajian sebagai dasar penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik dan tantangan manajemen peningkatan mutu kurikulum di Indonesia, khususnya dalam konteks transisi dan implementasi K13 serta Kurikulum Merdeka.

B. Pembahasan

1. Pengertian Manajemen Mutu

Manajemen dapat dipahami sebagai suatu proses kepemimpinan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa setiap individu pada dasarnya pernah menjalankan peran sebagai manajer dalam berbagai aspek kehidupannya.¹ Kualitas pendidikan mencakup seluruh aktivitas dan intervensi yang menghasilkan perubahan positif dalam aspek karakter, pola pikir, serta perilaku individu.² Selanjutnya, Mulyasana juga mengemukakan bahwa pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani individu menuju pencapaian kesempurnaan. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak seharusnya melahirkan individu yang menunjukkan sikap atau perilaku yang bersifat artifisial. Sebaliknya, pendidikan harus mampu mengintegrasikan dimensi sikap dan perilaku secara harmonis, sehingga membentuk pribadi yang utuh dan autentik.³

Definisi tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi dalam mengembangkan kapasitas individu serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan pendidikan nasional diarahkan pada pengembangan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan, kreatif, mandiri, serta mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang harus diupayakan secara maksimal melalui perencanaan yang matang dan terstruktur. Menurut Fathurrohman dan Sulistyorini, perbaikan mutu pendidikan dapat ditempuh melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan akademik dan penguatan keterampilan hidup yang esensial. Kualitas pendidikan dapat diukur dari tiga indikator utama, yakni: pembiayaan pendidikan, hasil keluaran (*output*), serta budaya literasi yang dikaji secara menyeluruh. Pertama, kualitas pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kecukupan dana yang dialokasikan. Kedua, mutu pendidikan yang tinggi berkorelasi dengan peningkatan angka kelulusan. Ketiga, budaya membaca secara komprehensif di negara-

¹ Murniati AR, *Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada SMA Negeri 1 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*, Jurnal Administrasi Pendidikan, ISSN 2302-0156, 3

² Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 2

³ *Ibid*

negara berkembang cenderung masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju.⁴

Adapun faktor yang menjadi indikator kualitas pendidikan mencakup beberapa komponen penting, yaitu input, proses, output, tenaga pendidik, sarana-prasarana, serta pembiayaan.⁵

- a. Input, proses, dan output. Ketiga aspek ini merupakan bagian fundamental dalam upaya pengembangan mutu pendidikan. Proses seleksi peserta didik baru (input), pelaksanaan pembelajaran (proses), serta hasil yang dicapai oleh peserta didik (*output*), merupakan rangkaian yang saling berkesinambungan dan memengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan.
- b. Tenaga pendidik, khususnya guru, memiliki peran strategis dalam implementasi kurikulum dan pengelolaan proses pembelajaran di kelas. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai panutan serta pembentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kepribadian positif dan mampu menginternalisasi nilai-nilai luhur dalam praktik pembelajaran.
- c. Sarana dan prasarana, Fasilitas pendidikan, baik berupa alat maupun media penunjang, sangat penting dalam mendukung kelancaran dan efektivitas proses belajar mengajar. Ketersediaan sarpras yang memadai, disertai dengan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan.
- d. Pembiayaan merupakan aspek krusial yang memengaruhi semua lini pelaksanaan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana pendidikan dibutuhkan untuk menunjang operasional rutin, kegiatan pembelajaran, serta pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pendidikan.

2. Tinjauan Singkat Tentang K13

Kurikulum 2013 merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum ini dikembangkan sebagai kelanjutan sekaligus penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Perbedaannya terletak pada penekanan Kurikulum 2013 terhadap pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-

⁴ Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, *Belajar dan Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 118

⁵ Ibid

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 35, yang menyatakan bahwa kompetensi lulusan mencerminkan kualifikasi kemampuan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional pendidikan.⁶

Kurikulum 2013 merupakan seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang berbasis pada pendekatan ilmiah, disusun dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan guna mewujudkan generasi emas Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar siswa lebih aktif terlibat dalam kegiatan belajar di kelas. Tujuan utama Kurikulum 2013 adalah mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, bernalar secara logis, serta mengkomunikasikan hasil pembelajaran secara efektif. Penyempurnaan kurikulum ini menitik beratkan pada integrasi fenomena alam, sosial, seni, dan budaya sebagai konteks pembelajaran. Selain itu, Kurikulum 2013 juga mengedepankan pengembangan tiga ranah utama dalam pendidikan, yakni sikap (afektif), keterampilan (psikomotorik), dan pengetahuan (kognitif), yang saling terintegrasi. Dengan demikian, kurikulum ini bertujuan membentuk peserta didik yang kreatif, inovatif, dan produktif.

Terdapat lima komponen system kurikulum yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Yaitu:

a. Tujuan kurikulum

Pendidikan memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan manusia dewasa ini. Oleh karena itu, hampir seluruh negara di dunia mewajibkan warganya untuk mengikuti proses pendidikan. Pelaksanaannya beragam, disesuaikan dengan falsafah negara masing-masing, kondisi sosial-politik, kapasitas sumber daya, serta lingkungan yang dimiliki. Meski berbeda dalam pendekatan teknis dan kebijakan, tujuan dasar pendidikan pada hakikatnya memiliki substansi yang serupa.

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, arah dan tujuan pendidikan dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan individu dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

⁶ Wiwin Fachrudin Yusuf. Implementasi Kurikulum 2013 (K13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD). (Jurnal Al-Murabbi, Vol. 3, No. 2, Juni 2018), 265-267

berakhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

b. Materi

Secara hakiki, materi kurikulum merujuk pada substansi atau isi dari kurikulum itu sendiri. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa isi kurikulum merupakan seperangkat bahan kajian dan pembelajaran yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dari suatu penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sejalan dengan upaya strategis dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh.

c. Metode

Metode dapat dipahami sebagai pendekatan atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks proses pembelajaran, metode mencerminkan keterlibatan aktif antara pendidik dan peserta didik dalam suatu kegiatan instruksional yang terstruktur, di mana interaksi tersebut menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar.

d. Organisasi kurikulum

Struktur organisasi kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Bentuk-bentuk tersebut antara lain: Pendekatan mata pelajaran terpisah, di mana setiap mata pelajaran disajikan secara mandiri tanpa keterkaitan eksplisit dengan mata pelajaran lain, Pendekatan korelatif, yang mengaitkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain yang memiliki keterkaitan isi atau konsep, Pendekatan bidang studi, yaitu pengelompokan mata pelajaran ke dalam cakupan disiplin ilmu yang lebih luas, Program yang berpusat pada anak, yang menempatkan minat, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik sebagai pusat pengembangan kurikulum, Pendekatan berbasis inti masalah, yang mengorganisasi materi pembelajaran berdasarkan isu atau permasalahan utama yang relevan dengan kehidupan peserta didik; dan Program eklektik, yakni pendekatan yang memadukan berbagai model organisasi kurikulum secara fleksibel dan selektif guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

e. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam struktur kurikulum, mengingat kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Melalui proses evaluasi, diperoleh data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan pembelajaran serta tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Informasi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan efektivitas kurikulum, pelaksanaan proses belajar mengajar, identifikasi hambatan yang dihadapi siswa, serta penentuan langkah-langkah bimbingan dan perbaikan yang diperlukan.⁷

Adapun prinsip K13 adalah:

- Perpindahan dari guru sebagai pusat belajar ke siswa sebagai pembelajar aktif
- Penggunaan pendekatan ilmiah
- Penyeimbangan *hard skill* dan *soft skill*
- Pengakuan atas perbedaan individu dan pemanfaatan TIK

3. Implementasi K13

- Prosedur implementasi

Berikut ini adalah alur prosedur implementasi Kurikulum 2013 (K13) yang menggambarkan tahapan-tahapan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik secara utuh.



Gambar tersebut menunjukkan lima tahapan utama dalam implementasi K13, yaitu: (1) *Pemanasan-apresiasi* untuk menjajaki pengetahuan awal dan memotivasi siswa; (2) *Eksplorasi* untuk mengaitkan materi baru dengan pengetahuan yang dimiliki; (3) *Konsolidasi pembelajaran* yang menekankan penguatan kompetensi dan keterkaitan materi dengan kehidupan nyata; (4) *Pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter* melalui pembelajaran kontekstual; serta (5) *Penilaian formatif* untuk perbaikan berkelanjutan berdasarkan analisis kelemahan peserta didik. Tahapan ini menekankan pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa.

- Tahapan implementasi

Kurikulum 2013 mengedepankan dimensi pedagogis modern dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menerapkan pendekatan ilmiah (scientific approach).

⁷ Qemar Hemalik, *Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) Hal 5-6.

Pendekatan ini mencakup serangkaian langkah sistematis yang meliputi aktivitas mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan, yang diterapkan pada seluruh mata pelajaran. Namun demikian, dalam konteks mata pelajaran, materi, atau kondisi tertentu, penerapan pendekatan ilmiah ini tidak selalu dapat dijalankan secara prosedural dan mungkin memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan efektif.

Dalam situasi tertentu, proses pembelajaran tetap harus mengintegrasikan nilai-nilai yang bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran disusun secara sistematis sebagai berikut:

c. Mengamati (*observing*)

Langkah awal ini menekankan pentingnya makna dalam proses pembelajaran (*meaningful learning*). Kegiatan mengamati memiliki sejumlah keunggulan, seperti menghadirkan objek secara nyata melalui media, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu peserta didik, serta mudah diterapkan dalam berbagai situasi pembelajaran.

d. Menanya (*questioning*)

Guru yang efektif mampu mendorong peserta didik untuk mengembangkan aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang membimbing dan memantik eksplorasi lebih lanjut. Proses bertanya dalam hal ini menjadi alat pedagogis untuk mengarahkan pembelajaran secara aktif.

e. Menalar (*associating*)

Tahapan menalar dalam pendekatan ilmiah sebagaimana diamanatkan dalam Kurikulum 2013 menuntut keterlibatan aktif peserta didik dalam proses berpikir logis dan sistematis. Kegiatan ini bertumpu pada pengolahan informasi berdasarkan fakta-fakta empiris yang dapat diamati, guna membentuk kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

f. Mencoba (*experiment*)

Untuk memperoleh hasil belajar yang autentik, peserta didik perlu melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan, khususnya pada materi yang memungkinkan penerapan praktis. Sebagai contoh, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami konsep rukun Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas kehidupan sehari-hari.

g. Membentuk jejaring atau pembelajaran kolaboratif (*networking*)

Pembelajaran kolaboratif bukan sekadar teknik pengajaran, melainkan merupakan suatu pandangan filosofis mengenai interaksi sosial dan gaya hidup manusia. Kolaborasi dipahami sebagai struktur interaksi yang dirancang secara sadar

untuk mendorong kerja sama yang efektif dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, pembelajaran menjadi proses kolektif yang saling mendukung antarindividu. Pemahaman atas tahapan-tahapan tersebut penting dalam rangka implementasi Kurikulum 2013, agar pelaksanaannya berjalan secara optimal dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁸

4. Tinjauan Singkat Tentang Kurikulum Merdeka

Konsep Merdeka Belajar menekankan pada kolaborasi antara peserta didik dan pendidik dalam menetapkan tujuan pembelajaran, merancang metode, menentukan bentuk evaluasi, serta melakukan refleksi terhadap materi yang telah dipelajari secara bersama-sama.⁹ Kurikulum Merdeka merupakan hasil pengembangan dari Kurikulum 2013 yang berfokus pada penguatan potensi dan kompetensi peserta didik, terutama dalam aspek keterampilan. Kurikulum ini awalnya diimplementasikan secara terbatas sebagai Kurikulum Prototipe pada Sekolah Penggerak, namun kini telah ditetapkan secara resmi sebagai Kurikulum Merdeka.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengatur proses belajarnya sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhannya.¹¹ Peserta didik berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, sementara pendidik berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses tersebut.

Kurikulum ini menitikberatkan pada empat komponen utama, yaitu: penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan survei karakter, pelimpahan wewenang pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional kepada masing-masing satuan pendidikan, penyederhanaan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta penerapan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).¹² Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Melalui pendekatan pembelajaran yang interaktif, siswa didorong untuk mengemukakan pendapat, melakukan eksplorasi, serta menganalisis isu secara lebih mendalam. Di samping itu, kurikulum ini juga berkontribusi dalam pengembangan kreativitas siswa, dengan menyediakan ruang untuk

⁸ Permendikbud. Kurikulum 2013. Jurnal Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.65 Tahun 2013 hal 21 Tentang Standart Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

⁹ Najelaa Shihab, Merdeka Belajar di Ruang kelas, (Tangerang Selatan: Literati, 2017), 5

¹⁰ Sukataman dkk., "Kritik Kepemimpinan Nadhiem Makariem Terhadap Kurikulum Merdeka," Ibtida: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar 3, no. 2 (2023).

¹¹ Huldya Syamsiar dkk., "Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis CIPP," Journal of Education and Instruction 6, no. 2 (2023)

¹² M. Rizki Hi Aman, "Kritik Terhadap Ivan Illich Kurikulum Merdeka Dengan Pedagogik," Jurnal Pendidikan Indonesia 13, no. 1 (2024): 125–38.

mengekspresikan ide dan berpikir secara inovatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, yang sangat relevan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan nyata.¹³

Salah satu keunggulan Kurikulum Merdeka terletak pada struktur kurikulumnya yang lebih sederhana namun mendalam, serta tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi. Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), program peminatan tidak lagi diterapkan, sehingga peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan tujuan masa depannya.¹⁴ Kegiatan proyek yang relevan dengan lingkungan juga disusun untuk membantu siswa mengembangkan karakter dan kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila. Hal ini diharapkan dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang kritis, kreatif, dan aplikatif.¹⁵

Kurikulum Merdeka dirancang untuk mewujudkan pembelajaran yang holistik dalam rangka membentuk profil Pelajar Pancasila yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan masa depan.¹⁶ Melalui kurikulum ini, pendidik diberikan ruang yang lebih fleksibel dalam merancang proses pembelajaran, serta memahami karakteristik, kebutuhan, dan potensi peserta didik secara lebih mendalam.¹⁷ Meskipun memberikan keleluasaan kepada siswa dalam memilih metode belajar yang sesuai dengan preferensi mereka, kurikulum ini tetap mengacu pada standar capaian pembelajaran yang telah ditentukan secara nasional.¹⁸



¹³ Andean Syahbana dkk., "Revolusi Pendidikan: Analisis Kurikulum Merdeka Sebagai Inovasi Pendidikan," *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 3, no. 2 (2024).

¹⁴ Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini, Ni Ketut Suarni, dan I Ketut Suar Adnyana, "Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas," *Jurnal Penjaminan Mutu* 8, no. 2 (2022): 243–50, <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02.1386>.

¹⁵ Ineu Sumarsih dkk., "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 6, no. 5 (2022): 8248–58, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>.

¹⁶ Diah Lestari, Masduki Asbari, dan Eka Erma Yani, "Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan," *JISMA: journal of information systems and management* 2, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.62214/jayu.v1i2.129>

¹⁷ Restu Rahayu dkk., "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak," *Jurnal Basicedu* 6, no. 4 (2022): 6313–19, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>.

¹⁸ Mulik Cholilah dkk., "Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21," *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2022): 56–67, <https://doi.org/10.58812/spp.v1.i02>

Perubahan kurikulum menuntut adaptasi terhadap kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik, khususnya dalam aspek pedagogik.¹⁹ Namun, dalam implementasinya, banyak satuan pendidikan belum melaksanakan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan guna menjamin keselarasan antara perkembangan ilmu pengetahuan, materi ajar, dan metode pembelajaran.²⁰ Evaluasi tersebut sangat penting agar setiap elemen dalam proses pembelajaran dapat diperbaharui secara konsisten sesuai dengan dinamika dan tuntutan kurikulum yang sedang diterapkan. Upaya ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembelajaran senantiasa mengalami pembaruan yang selaras dengan dinamika dan kebutuhan kurikulum yang sedang diterapkan.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, manajemen pendidikan memegang peran strategis dalam menciptakan proses pembelajaran yang atraktif dan dinamis, sejalan dengan esensi utama dari konsep merdeka belajar. Suasana belajar yang menyenangkan ini diharapkan mampu mendukung peserta didik dalam mengembangkan kesiapan menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.²¹ Di jenjang pendidikan sekolah dasar, pelaksanaan Kurikulum Merdeka menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penguatan lebih lanjut guna mencapai tingkat optimalisasi yang diharapkan.²² Tujuan utama dari program ini bukan untuk menggantikan kurikulum yang telah ada sebelumnya, melainkan untuk melakukan pembaruan terhadap sistem pendidikan agar lebih sesuai dan responsif terhadap tuntutan dan dinamika perkembangan zaman.²³

Evaluasi terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka memegang peranan penting, terutama dalam menilai efektivitas, keberlanjutan, serta dampak implementasinya di satuan pendidikan.²⁴ Kurikulum itu sendiri merupakan komponen esensial yang menetapkan dasar, prinsip, arah, dan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, upaya pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap dinamika zaman, serta berpijak pada

¹⁹ Syahrul Hamdi, Cepi Triatna, dan Nurdin, "Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pedagogik," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 7, no. 1 (2022): 10–17, <https://doi.org/10.30998/sap.v7i1.13015>.

²⁰ Dalam praktik implementasi, pengelola satuan pendidikan belum melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perkembangan dalam bidang keilmuan, materi pelajaran, dan metode penyampaian.

²¹ Muslim HU, "Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2023): 65–70, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.2033>

²² Ayu Puspitasari, Akhmad Muadin, dan Agus Salim Salabi, "Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Model CIPP di SD Bontang," *An-Nizom* 8, no. 1 (2023): 49–58.

²³ Heroza Firdaus dkk., "Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 686–92

²⁴ Selamat Ariga, "Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 662–70, <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.225>.

konteks sosial, budaya, dan kondisi aktual masyarakat, merupakan strategi krusial dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.²⁵

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap dan mengedepankan fleksibilitas, dengan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing.²⁶ Pemerintah menyediakan tiga opsi implementasi, yaitu: pertama, tetap menggunakan kurikulum yang berlaku dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka; kedua, mengadopsi Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang telah disediakan oleh pemerintah; dan ketiga, mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui pengembangan perangkat ajar secara mandiri oleh sekolah berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan.²⁷ Ragam pilihan ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi sekolah dalam menentukan strategi pembelajaran yang relevan dan kontekstual.

Perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan menuntut para pendidik untuk terus beradaptasi dengan dinamika kurikulum yang senantiasa berkembang. Kurikulum Merdeka Belajar, meskipun masih tergolong baru, belum sepenuhnya diimplementasikan secara merata di seluruh jenjang sekolah dasar.²⁸ Sejumlah tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaannya antara lain peningkatan durasi pembelajaran, kesiapan guru dalam memahami esensi konsep merdeka belajar, pergeseran peran peserta didik menjadi subjek aktif dalam proses pendidikan, transformasi peran guru sebagai fasilitator, adaptasi metode pengajaran, serta keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana pendukung.

Meskipun demikian, Kurikulum Merdeka hadir sebagai sebuah inovasi strategis dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk karakter dan kompetensi peserta didik agar mampu bersaing dalam konteks global. Melalui fleksibilitas yang ditawarkan, kurikulum ini memberi ruang bagi satuan pendidikan dan pendidik untuk menyesuaikan pendekatan serta materi pembelajaran berdasarkan potensi dan minat individu siswa, sehingga mereka dapat lebih aktif terlibat dalam proses belajar. Walaupun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, transformasi ini merupakan

²⁵ Difana Leli Angraini dkk., "Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 290–98, <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>

²⁶ Dewi Rahmadayani dan Agung Hartoyo, "Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar," *Jurnal basicedu* 6, no. 4 (2022).

²⁷ Rusmiati, Ashifa, dan Herlambang, "Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar."

²⁸ Siti Zulaiha, Tika Meldina, dan Meisin, "Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar," *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3197>.

langkah nyata dalam membangun sistem pendidikan Indonesia yang lebih adaptif, progresif, dan inklusif di masa mendatang.

5. Perbedaan K13 dan Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) merupakan sebuah inisiatif pendidikan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Program ini dirancang sebagai respons strategis terhadap kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan nasional serta adaptasi terhadap dinamika global yang terus berkembang. Salah satu latar belakang munculnya Kurikulum Merdeka adalah kebutuhan untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi pasca pandemi COVID-19. Kurikulum ini mulai diterapkan secara bertahap di satuan pendidikan yang telah dinyatakan siap mengadopsinya.²⁹

Pasca pandemi COVID-19, kondisi pendidikan mengalami tantangan yang signifikan, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi untuk mencegah terjadinya krisis pembelajaran yang lebih luas, menggantikan dominasi Kurikulum 2013 (K-13) yang sebelumnya menjadi acuan utama pendidikan nasional. Meskipun K-13 sudah mengusung prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Kurikulum Merdeka membawa pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Fokus utama Kurikulum Merdeka adalah penguatan pembelajaran berbasis kompetensi. Kurikulum ini menitikberatkan pada pengembangan keterampilan dasar dan kemampuan adaptif siswa agar mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. Penerapan di kelas diarahkan untuk memperkuat keterampilan praktis, seperti komunikasi, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi, yang menjadi bagian integral dari kecakapan hidup abad ke-21.

Perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka mencerminkan evolusi paradigma pendidikan di Indonesia. K-13 memiliki struktur yang lebih sistematis dengan penekanan pada capaian kompetensi dasar dan inti, sedangkan Kurikulum Merdeka menawarkan kebebasan dan keleluasaan bagi pendidik serta peserta didik dalam mengelola proses pembelajaran. Pemilihan kurikulum yang digunakan pada dasarnya didasarkan pada kesiapan institusi pendidikan serta visi pembelajaran yang hendak dicapai dalam membentuk profil pelajar Pancasila.

²⁹ Difana Leli Anggraini dkk., "Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 290–98, <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>

Tabel Perbedaan K13 dan Kurikulum Merdeka

Aspek	Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka
Fokus pembelajaran	Pendekatan tematik	Pembelajaran berbasis proyek
Prinsip pembelajaran	Pembentukan karakter, moral	Kemandirian, keberagaman, karakter
Struktur kurikulum	Tematik, muatan lokal	Fleksibel, KTSP lebih terbuka
Penggunaan teknologi	Pemanfaatan teknologi	Mengintegrasikan teknologi
Penilaian	Beragam, ujian nasional	Berbasis kompetensi, portofolio
Koneksi dengan industry	Tidak terlalu menekankan	Kolaborasi dengan dunia industry
Peningkatan kualitas guru	Pembinaan karakter guru	Pelatihan dan pengembangan guru

Sumber: diolah peneliti, 2025

Tabel di atas menunjukkan perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka dalam berbagai aspek penting penyelenggaraan pendidikan. Dari segi fokus pembelajaran, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sedangkan Kurikulum Merdeka menekankan pada *pembelajaran berbasis proyek* yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dan kontekstual.

Dalam prinsip pembelajaran, Kurikulum 2013 berorientasi pada pembentukan karakter dan moral, sedangkan Kurikulum Merdeka memperluas prinsip tersebut dengan menekankan pada penguatan kemandirian, pengakuan terhadap keberagaman, serta pembentukan karakter secara lebih inklusif. Struktur kurikulumnya juga mengalami perubahan signifikan: jika pada Kurikulum 2013 lebih bersifat tematik dan didominasi oleh muatan lokal, maka Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan melalui struktur yang lebih fleksibel, di mana Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih terbuka untuk disesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing.

Dari sisi penggunaan teknologi, Kurikulum 2013 mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, sementara Kurikulum Merdeka melangkah lebih jauh dengan *mengintegrasikan teknologi* secara menyeluruh dalam proses pembelajaran dan penilaian. Dalam hal penilaian, Kurikulum 2013 mengandalkan berbagai bentuk asesmen termasuk ujian nasional, sedangkan Kurikulum Merdeka lebih menekankan penilaian berbasis kompetensi dan portofolio.

Kurikulum Merdeka juga menunjukkan perhatian lebih terhadap koneksi dengan dunia industri, dengan mendorong kolaborasi langsung antara institusi pendidikan dan

sektor industri, yang sebelumnya kurang ditekankan dalam Kurikulum 2013. Terakhir, dalam aspek peningkatan kualitas guru, Kurikulum 2013 fokus pada pembinaan karakter pendidik, sementara Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas untuk *pelatihan dan pengembangan profesional* bagi guru agar mampu menghadapi tantangan pembelajaran abad ke-21.

C. Kesimpulan

Peningkatan mutu kurikulum di Indonesia memerlukan manajemen yang terarah, strategis, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka merupakan dua pendekatan yang dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan abad 21 dengan karakteristik masing-masing. K13 mengedepankan pembelajaran berbasis ilmiah dan penilaian autentik secara sistematis, sementara Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada pendidik dan peserta didik untuk menyusun proses pembelajaran yang kontekstual dan berpusat pada kebutuhan siswa. Keberhasilan implementasi kedua kurikulum tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial lembaga pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Fleksibilitas Kurikulum Merdeka menjadi keunggulan dalam menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan adaptasi siswa terhadap berbagai perubahan. Namun, hal ini juga menuntut kesiapan yang tinggi dari pihak sekolah dan guru, terutama dalam aspek pedagogik dan infrastruktur. Dengan demikian, penguatan kapasitas manajemen pendidikan, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta dukungan kebijakan yang konsisten menjadi syarat utama untuk mendorong transformasi kurikulum yang bermutu, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Referensi

- AR Murniati , *Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada SMA Negeri 1 Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*, Jurnal Administrasi Pendidikan, ISSN 2302-0156
- Mulyasana Dedi, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Fathurrohman Muhammad & Sulistyorini, *Belajar dan Pembelajaran Membantu Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional*, (Yogyakarta: Teras, 2012
- Fachrudin Wiwin Yusuf. Implementasi Kurikulum 2013 (K13) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar (SD). (Jurnal Al- Murabbi, Vol. 3, No. 2, Juni 2018), 265-267
- Hemalik Qemar, *Dasar Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

- Permendikbud. Kurikulum 2013. Jurnal Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.65 Tahun 2013 hal 21 Tentang Standart Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Shihab Najelaa, *Merdeka Belajar di Ruang kelas*, (Tanggerang Selatan: Literati, 2017
- Sukataman dkk., “*Kritik Kepemimpinan Nadhiem Makariem Terhadap Kurikulum Merdeka*,” Ibtida: Jurnal Kajian Pendidikan Dasar 3, no. 2, 2023
- Huldiya Syamsiar dkk., “*Evaluasi Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis CIPP*,” Journal of Education and Instruction 6, no. 2 (2023)
- M. Rizki Hi Aman, “*Kritik Terhadap Ivan Illich Kurikulum Merdeka Dengan Pedagogik*,” Jurnal Pendidikan Indonesia 13, no. 1 (2024)
- Andrean Syahbana dkk., “*Revolusi Pendidikan: Analisis Kurikulum Merdeka Sebagai Inovasi Pendidikan*,” Journal of Information Systems and Management (JISMA) 3, no. 2 (2024).
- Dewa Ayu Made Manu Okta Priantini, Ni Ketut Suarni, dan I Ketut Suar Adnyana, “*Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas*,” Jurnal Penjaminan Mutu 8, no. 2 (2022): 243–50, <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02>.
- Ineu Sumarsih dkk., “*Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar*,” Jurnal Basicedu 6, no. 5 (2022): 8248–58, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>.
- Diah Lestari, Masduki Asbari, dan Eka Erma Yani, “*Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan*,” JISMA: journal of information systems and management 2, no. 5 (2023), <https://doi.org/10.62214/jayu.v1i2.129>
- Restu Rahayu dkk., “*Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak*,” Jurnal Basicedu 6, no. 4 (2022): 6313–19, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>.
- Mulik Cholilah dkk., “*Pengembangan Kurikulum Merdeka Dalam Satuan Pendidikan Serta Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Abad 21*,” Sanskara Pendidikan dan Pengajaran 1, no. 2 (2022): 56–67, <https://doi.org/10.58812/spp.v1.i02>
- Syahrul Hamdi, Cepi Triatna, dan Nurdin, “*Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Pedagogik*,” SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 7, no. 1 (2022): 10–17, <https://doi.org/10.30998/sap.v7i1.13015>.
- Muslim HU, “*Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis*,” Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer 3, no. 1 (2023): 65–70, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.2033>
- Ayu Puspitasari, Akhmad Muadin, dan Agus Salim Salabi, “*Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Menggunakan Model CIPP di SD Bontang*,” An-Nizom 8, no. 1 (2023)
- Heroza Firdaus dkk., “*Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka*,” Jurnal Pendidikan dan Konseling 4, no. 4 (2022)

- Selamat Ariga, “Implementasi Kurikulum Merdeka Pasca Pandemi Covid-19,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 662–70, <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.225>.
- Difana Leli Anggraini dkk., “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 290–98, <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>
- Dewi Rahmadayani dan Agung Hartoyo, “Potret Kurikulum Merdeka, Wujud Merdeka Belajar di Sekolah Dasar,” *Jurnal basicedu* 6, no. 4 (2022).
- Rusmiati, Ashifa, dan Herlambang, “Analisis Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar.”
- Siti Zulaiha, Tika Meldina, dan Meisin, “Problematika Guru Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar,” *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3197>.
- Difana Leli Anggraini dkk., “Peran Guru Dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka,” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 3 (2022): 290–98, <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>